



PERAN KEPEMIMPINAN, KELEMBAGAAN, DAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH: STUDI KASUS PENGELOLAAN SAMPAH ZERO LANDFILL KABUPATEN BANYUMAS

Januarta Dwi Kusmayanti^{1,*}, Deshinta Sekar Ayuningtyas¹

¹Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Institut Teknologi Bandung
Jl. Ganesa No. 10, Lb. Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*corresponding author

email: januartadk@gmail.com

Abstract

Sustainable waste management remains a critical challenge amid increasing demands for environmentally oriented regional development. This study examines the role of leaderships, institutions, and social capital in supporting zero-landfill waste management in the Banyumas Regency, Indonesia. Using a qualitative desk research approach based on policy documents, secondary statistical data, and relevant literature, this study adopts an endogenous perspective to analyze how waste management functions as a catalyst for local economic and social development. The findings indicate that visionary leadership plays a strategic role in integrating waste management into regional development planning and fostering cross-sector collaboration. Institutional strengthening enables effective coordination among government agencies, community-based organizations, and private sector actors, while social capital enhances community participation and supports the emergence of waste-based local entrepreneurship. Although the contribution of the waste sector to regional GDP remains limited, the analysis demonstrates substantial economic and social benefits at the community level, including job creation, income generation, and operational efficiency. This study highlights that the integration of leadership, institutions, and social capital constitutes a critical prerequisite for building a sustainable and adaptive waste management system within an endogenous regional development framework.

Keywords: endogenous development, institutions, leadership, social capital, waste management.

Abstrak

Pengelolaan sampah berkelanjutan merupakan tantangan besar dalam pembangunan wilayah yang berorientasi lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan, kelembagaan, dan modal sosial dalam mendukung pengelolaan sampah *zero-landfill* di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui *desk research* dengan memanfaatkan dokumen kebijakan, data sekunder, dan literatur yang relevan. Dengan perspektif pembangunan endogen, studi ini menelaah praktik pengelolaan sampah berfungsi sebagai katalis pembangunan wilayah melalui penguatan kapasitas lokal, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi kewirausahaan berbasis masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan visioner berperan penting dalam mengarusutamakan pengelolaan sampah ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta mendorong inovasi kebijakan. Penguatan kelembagaan memungkinkan koordinasi antaperlaku berjalan lebih efektif, sementara modal sosial memperkuat partisipasi masyarakat dan mendukung tumbuhnya aktivitas ekonomi berbasis komunitas. Meskipun kontribusi sektor persampahan terhadap PDRB daerah masih terbatas, pengelolaan sampah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan pada skala lokal, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan efisiensi biaya operasional. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi kepemimpinan, kelembagaan, dan modal sosial merupakan prasyarat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan adaptif dalam kerangka pembangunan endogen wilayah.

Kata Kunci: kelembagaan, kepemimpinan, modal sosial, pembangunan endogen, pengelolaan sampah.

I. PENDAHULUAN

Pengembangan wilayah merupakan proses multidimensional yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta

memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan (Adni & Setyono, 2017; Li et al., 2024; Medeu et al., 2025; Sumarna et al., 2023). Dalam konteks ini, pengelolaan sampah menjadi

salah satu sektor lingkungan yang strategis karena berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan SDG 11 dan SDG 12, sekaligus berdampak pada keseharian masyarakat, perubahan iklim, serta pola produksi dan konsumsi berkelanjutan (Aminah & Muliawati, 2021; Andrianto & Sadat, 2025; UNEP, 2015; Yojana et al., 2025).

Kabupaten Banyumas menjadi contoh menarik dalam pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lokal. Berbagai penghargaan nasional dan regional, seperti *Indonesia Green Awards* (IGA) 2024 dari *The La Tofi School of CSR* dan penghargaan sebagai pengelola sampah terbaik di Asia Tenggara dalam *Smart Green ASEAN Cities (SGAC) Programme's 2nd City Windows Series* menunjukkan pengakuan terhadap inovasi dan kinerja pengelolaan sampah di daerah ini (Anugrah, 2023; Effendi, 2024; Redaksi Merdeka, 2023; Wahyudi, 2024). Strategi yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai aktor utama melalui program bank sampah, TPS3R, dan pengembangan kewirausahaan daur ulang (Ilhami, 2021; Marlina et al., 2021; Putra, 2023; Rosyidah, 2024). Namun, pengelolaan sampah tetap menghadapi tantangan kompleks, baik teknis maupun non-teknis termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan keberlanjutan partisipasi masyarakat (Lingga et al., 2024).

Studi ini berpedoman pada pendekatan pembangunan endogen yang menekankan pemanfaatan potensi dan kapasitas lokal sebagai penggerak utama pembangunan wilayah (R. J. Stimson et al., 2006; Vázquez-Barquero, 2002). Pendekatan ini menawarkan alternatif terhadap pembangunan eksogen yang cenderung bergantung pada investasi dan teknologi eksternal (Pike et al., 2017). Dalam kerangka ini, kepemimpinan, kelembagaan, dan modal sosial dipandang sebagai faktor kunci yang memungkinkan pengelolaan sampah berkontribusi lebih luas terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi analisis integratif mengenai peran kepemimpinan,

kelembagaan, dan modal sosial dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, serta menjelaskan bagaimana interaksi ketiga elemen tersebut berkontribusi terhadap pembangunan wilayah dengan memaksimalkan sumber daya internal dalam perspektif pembangunan endogen.

II. KAJIAN PUSTAKA

Kepemimpinan merupakan kapasitas untuk memengaruhi tindakan kolektif (Badu & Djafri, 2017) sekaligus sebagai praktik relasional yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam konteks tertentu (Raelin, 2016). Dalam pembangunan wilayah dan pengelolaan sampah, sejumlah penelitian menegaskan kepemimpinan kolaboratif yang didukung oleh modal sosial berperan penting dalam menghubungkan kebijakan, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengembangkan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal (Ansell & Gash, 2007; Haryanti et al., 2023). Di sisi lain, pemerintah daerah juga menunjukkan komitmen melalui penerbitan berbagai regulasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi berfungsi sebagai instrument yang membuka ruang partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sampah (Islamiaty, 2024). Modal sosial, yang tergambaran dalam jaringan, norma, dan kepercayaan masyarakat, juga mendorong kolaborasi dan inovasi komunitas seperti bank sampah, budaya maggot, dan kewirausahaan lainnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Haryanti et al., 2023; Syahli & Sekarningrum, 2017).

Namun, dalam literatur yang ditelaah, kajian-kajian tersebut umumnya masih membahas aspek kepemimpinan, kelembagaan, atau modal sosial secara parsial dan belum menempatkan ketiganya sebagai satu kesatuan mekanisme pembangunan endogen untuk menjelaskan kontribusi pengelolaan sampah terhadap pembangunan wilayah, khususnya pada

konteks daerah non-metropolitan di Indonesia.

III. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *desk research* untuk menganalisis peran kepemimpinan, kelembagaan, dan modal sosial dalam pengelolaan sampah serta kontribusinya terhadap pembangunan wilayah di Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara sistematis kebijakan, praktik, dan dinamika kelembagaan melalui sumber-sumber sekunder yang relevan.

Sumber data yang digunakan, terdiri dari dokumen kebijakan dan perencanaan, seperti peraturan daerah, peraturan bupati, RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, dan dokumen teknis seperti Renstra DLH Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dan BPS terkait kinerja sektor persampahan; publikasi ilmiah berupa artikel jurnal dan buku yang membahas pembangunan endogen, kepemimpinan, kelembagaan, modal sosial, dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat; dan dokumen pendukung lainnya seperti laporan program, studi kasus, dan publikasi institusi terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi pemerintah berbasis data jurnal ilmiah dan sumber daring terpercaya. Data yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dengan tujuan penelitian dan kesesuaiannya dengan kerangka teoritis pembangunan endogen. Analisis dilakukan dengan menafsirkan temuan kebijakan dan data sekunder sebagai representasi praktik tata kelola, bukan sebagai evaluasi implementasi program. Setiap kategori dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris pada konsep-konsep teoritis yang digunakan. Selain itu, untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan literatur akademik. Konsistensi data juga diuji melalui pencocokan temuan antar periode dan antar sumber. Meskipun pendekatan *desk research*

memiliki keterbatasan dalam menggali persepektif aktor secara langsung, metode ini dinilai memadai untuk memahami pola kebijakan, praktik pengelolaan sampah, dan dinamika pembangunan wilayah di Kabupaten Banyumas.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Sektor Persampahan Kabupaten Banyumas

Perkembangan sektor persampahan, tahun 2019 di Kabupaten Banyumas dipilih sebagai *baseline* awal. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan sampah dengan diterbitkannya peraturan daerah tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Peraturan Bupati No. 45 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Banyumas Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 54 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Tugas Pembantuan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kepada Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas). Peraturan ini menjadi landasan utama yang memberikan dasar hukum bagi pembangunan fasilitas pengolahan sampah dengan basis pemberdayaan masyarakat. Selain itu, tahun 2018 juga menjadi momen penting karena terjadi demo masyarakat yang menuntut penghentian operasional TPA Kaliori akibat pencemaran lingkungan, yang kemudian menjadi momentum penting bagi perubahan arah kebijakan pengelolaan sampah menuju pendekatan lebih berkelanjutan (Ningrum et al., 2020; Ridlo, 2018). Oleh karena itu, tahun 2019 dianggap sebagai awal perubahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

Kontribusi PDRB: Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

Sektor persampahan di Kabupaten Banyumas memiliki potensi ekonomi bagi masyarakat (Pramono & Sanggoro, 2024) melalui pembentukan bank sampah yang melibatkan langsung masyarakat dalam

proses pengelolaan; pengelolaan Pusat Daur Ulang (PDU) oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang membuka peluang wirausaha; pengelolaan TPS3R oleh KSM; serta operasionalisasi TPA BLE (Berbasis Lingkungan dan Edukasi) (Aulia et al., 2022; Bahfein & Alexander, 2025; Haryanti et al., 2023; Mayori, 2024; Rosyidah, 2024). Meskipun memiliki potensi tersebut, kontribusi sektor ini terhadap struktur ekonomi daerah masih sangat rendah atau paling kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Tabel 1
Kontribusi PDRB Menurut Sektor 2019-2023

Sektor PDRB	Kontribusi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,4%	11,7%	11,4%	11,0%	10,6%
Pertambangan dan Penggalian	4,8%	4,8%	4,8%	4,6%	4,4%
Industri Pengolahan	23,0%	23,4%	23,3%	23,1%	23,1%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Konstruksi	13,0%	12,7%	13,2%	12,8%	12,5%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,8%	16,4%	16,7%	16,5%	16,5%
Transportasi dan Pergudangan	3,9%	2,7%	2,7%	4,6%	4,8%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,6%	3,4%	3,5%	3,8%	4,0%
Informasi dan Komunikasi	6,9%	8,0%	8,1%	7,8%	8,2%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,9%	3,0%	2,9%	2,8%	2,7%
Real Estate	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Jasa Perusahaan	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Sektor PDRB	Kontribusi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,8%	2,8%	2,7%	2,6%	2,6%
Jasa Pendidikan	4,9%	4,9%	4,8%	4,6%	4,6%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%
Jasa Lainnya	2,0%	1,9%	1,8%	1,9%	2,0%

Sumber: BPS Kab. Banyumas, 2024

Tabel 1 menunjukkan kontribusi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banyumas selama periode 2019-2023. Dibandingkan dengan sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, sektor persampahan secara konsisten hanya berkontribusi sekitar 0,1% dari total PDRB. Pola ini mengindikasikan bahwa sektor persampahan belum berperan signifikan sebagai penggerak utama perekonomian daerah dalam jangka pendek. Namun, rendahnya kontribusi tersebut tidak langsung mencerminkan minimnya nilai strategis sektor ini atau kegagalan sektor persampahan, tetapi menunjukkan karakter pembangunan endogen yang dampaknya lebih banyak terdistribusi pada skala mikro dan komunitas dibandingkan akumulasi dalam struktur ekonomi makro daerah.

Perkembangan PDRB dan LPE Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

Perkembangan PDRB sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun 2019 (34.479,69 juta) hingga tahun 2023 (40.577,07 juta). Namun, tren kenaikan ini tidak terjadi pada Laju Pertumbuhan Ekonominya (LPE) yang mengalami fluktuasi selama periode tersebut (Gambar 1). Gambar 1 memperlihatkan bahwa meskipun PDRB sektor persampahan meningkat secara bertahap, LPE menunjukkan dinamika yang lebih volatil. Penurunan LPE pada tahun 2020

(4,15%) dapat dipahami dalam konteks dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi. Lonjakan LPE pada tahun 2021 (5,66%) terjadi bersamaan dengan implementasi kebijakan daerah yang menekankan penguatan infrastruktur dan kelembagaan pengelolaan sampah, seperti penambahan fasilitas TPST/ PDU/ TPS3R dan serta pembangunan TPA BLE sebagaimana termuat dalam RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 (Perbup Kabupaten Banyumas No. 41 tahun 2021). Penurunan kembali pada tahun 2022 (2,74%) mengindikasikan adanya tantangan struktural atau faktor eksternal lainnya dalam konsolidasi sektor ini, sebelum meningkat kembali pada tahun 2023 (4,09%) seiring dengan upaya penguatan kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Banyumas yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 (Perbup Kabupaten Banyumas Nomor 47 tahun 2023).

Gambar 1

Perkembangan PDRB dan LPE Sektor Persampahan 2019-2023



Sumber: BPS Kab. Banyumas (data diolah)

Dalam perspektif pembangunan endogen, pola ini menggambarkan sektor persampahan masih berada pada fase adaptasi dan konsolidasi kelembagaan. Peningkatan PDRB dan fluktuasi LPE tidak dipahami sebagai hubungan sebab-akibat linier, melainkan sebagai indikasi proses bertahap yang dimediasi oleh kepemimpinan daerah, penguatan kelembagaan, dan modal sosial. Dengan demikian, kinerja ekonomi sektor persampahan lebih tepat jika dilihat sebagai hasil dari pembentukan ekosistem kebijakan dan kelembagaan yang mendukung, bukan sebagai dampak langsung dari satu intervensi kebijakan tertentu.

Pendapatan dari Pengelolaan Sampah Kabupaten Banyumas

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan menjadi salah satu upaya penting dalam menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelolaan sampah secara terpadu di Kabupaten Banyumas menunjukkan kontribusi nyata terhadap penciptaan nilai ekonomi, khususnya pada level komunitas dan operasional. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai ekonomi pendapatan pengelolaan sampah *non-landfill* dari hulu ke hilir selama periode 2020-2022 yang menunjukkan perkembangan positif.

Total pendapatan dari berbagai aktivitas pengelolaan sampah meningkat secara signifikan, dari sekitar Rp817 juta pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp2,09 miliar pada tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan dari pengolahan maggot, rongsok, dan RDF, yang menunjukkan semakin optimalnya pemanfaatan sampah sebagai sumber daya ekonomi (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2023). Pola tersebut menggambarkan bahwa pendekatan pengelolaan sampah berbasis pemilahan dan daur ulang memiliki potensi ekonomi yang nyata ketika didukung oleh kelembagaan dan akses pasar yang memadai.

Tabel 2

Nilai Ekonomi Pendapatan Pengelolaan Sampah Dari Hulu-Tengah-Hilir Non-Landfill Tahun 2020-2022

Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Sumber data
Pendapatan				
Rongsok	363.370.008	545.054.400	726.740.004	Data sampah KSM
Kompos	85.000.000	175.048.000	107.770.500	SPJ pencairan kompos KSM
Maggot	264.600.000	441.000.000	882.000.000	KSM budidaya maggot
Kasgot	32.000.000	55.000.000	102.552.000	SPJ pencairan kasgot KSM
RDF	32.719.200	98.157.600	163.596.000	Data sampah KSM

Salinmas	39.834.94	86.792.52	76.100.432	Superadmin
8	8			Salinmas
JEKNY O	0	32.001.154	BIJ	
ONG				
Total	817.524.156	1.401.05	2.090.	
Pendapatan	2.528	760.09		
		0		
Lapangan Pekerjaan				
Jumlah	5.760.000	12.000.00	16.902.000	Data TK
Upah	.000	0.000	000	KSM
TK				
Efisiensi	1.515.000	1.259.000	945.000.00	Biaya operasional angkut
	.000	000	0	

Sumber: Pemkab Banyumas, 2023

Selain peningkatan pendapatan, Tabel 2 juga menunjukkan dampak sosial yang signifikan melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Total upah tenaga kerja meningkat hampir tiga kali lipat, dari Rp5,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp16,9 miliar pada tahun 2022. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan sampah (Herlina et al., 2022; Mayori, 2024; Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2023). Di sisi lain, penurunan biaya operasional angkut dari Rp1,51 miliar menjadi Rp945 juta pada periode tersebut menunjukkan peningkatan efisiensi sistem pengelolaan sampah yang memperkuat keberlanjutan operasional program (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2023).

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kontribusi sektor persampahan terhadap PDRB daerah masih relatif kecil, manfaat ekonomi dan sosialnya pada skala komunitas cukup signifikan. Dalam kerangka pembangunan endogen, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal berbasis masyarakat yang dampaknya lebih dapat dirasakan pada penciptaan lapangan kerja, efisiensi biaya publik, penguatan kewirausahaan lokal, dan bahkan keberlanjutan lingkungan dibandingkan dengan peningkatan indikator makro ekonomi jangka pendek (Hidayatullah

et al., 2024; Islamiati, 2024; Putra, 2023; Rosyidah, 2024).

3.2 Peran Kepemimpinan, Kelembagaan, dan Modal Sosial dalam Pembangunan Wilayah melalui Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas

Identifikasi Aktor dan Perannya dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas

Pendekatan pentahelix digunakan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini merupakan bentuk kolaborasi lima elemen utama, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor bisnis, dan media (Carayannis & Campbell, 2010).

Tabel 3

Peran Aktor-aktor Dalam Pengelolaan Sampah di Banyumas

Aktor	Peran
Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Pemimpin Daerah (Bupati & Wakil Bupati) <ul style="list-style-type: none"> - Pengambil kebijakan tertinggi, Mengesahkan kebijakan dan regulasi, Mengawasi implementasi kebijakan dan regulasi, Mendorong kolaborasi lintas sektor.
Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Mengawasi operasional TPS3R/TPST/PDU, dan TPA BLE, - Memberikan pelatihan, edukasi, dan sosialisasi (fasilitator) kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah, - Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, - Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan

Aktor		Peran
		penanganan sampah.
Dinas Pekerjaan Umum	-	Membeli hasil produk daur ulang sampah
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM, Disperindag, Dekranasda	-	Memasarkan hasil olahan/ produk daur ulang sampah dari bank sampah
Pemerintah Desa	-	Penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat, - Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat
Dinas Kominfo	-	Mengembangkan sistem informasi SALINMAS (aplikasi untuk melakukan manajemen sampah)
Masyarakat	Masyarakat umum	- Memilah dan mengolah sampah di tingkat rumah tangga, - Nasabah bank sampah
	KSM	- Mengelola TPS3R/TPST/PDU: pemilahan, pengolahan, dan daur ulang sampah dari masyarakat - Melakukan kegiatan edukasi berbasis masyarakat
Akademisi	Perguruan Tinggi	- Melakukan penelitian dan kajian inovasi teknologi pengelolaan sampah, - Memberikan pendampingan bagi KSM dan masyarakat
Sektor Bisnis	PLTU Adipala Cilacap	- Membeli sampah dari KSM dan TPA BLE untuk diolah menjadi bahan bakar alternatif energi terbarukan
	PT. Greenprosa Adikara Nusa	- <i>Startup</i> lokal, membeli sampah organik dari masyarakat untuk di daur ulang - <i>Sharing knowledge</i> kepada masyarakat dalam pengolahan sampah organik
	PT. SBI Cilacap	- Membeli sampah dari KSM dan TPA

Aktor		Peran
		BLE sebagai bahan RDF
PT. BIJ	-	Mengoperasikan aplikasi Jeknyong, bekerja sama dengan DLH dan Diskominfo
Media	Media	- Pemberitaan dan kampanye pengelolaan sampah berkelanjutan
Lembaga Sosial	-	Memberikan pendampingan dan mendukung pelaksanaan program berbasis komunitas

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Konfigurasi aktor dalam skema *pentahelix* sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3, menunjukkan adanya *institutional thickness* dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, yaitu interaksi antara pemerintah, masyarakat, sektor bisnis, akademisi, dan media membentuk jaringan kelembagaan yang relatif padat dan saling terhubung. Dalam kerangka pembangunan endogen, kondisi ini penting karena memungkinkan terjadinya koordinasi, pembelajaran bersama, dan pemanfaatan sumber daya lokal secara kolektif, sehingga pengelolaan sampah tidak hanya menjadi urusan teknis, tetapi juga instrumen pembangunan wilayah.

Analisis Peran Kepemimpinan

Peran kepemimpinan daerah di Kabupaten Banyumas tidak hanya terpusat pada perumusan visi dan kebijakan, tetapi juga dalam integrasi pengelolaan sampah ke dalam perencanaan pembangunan wilayah, pemberdayaan kelembagaan lokal, serta penguatan partisipasi masyarakat (Tabel 4). Dalam konteks pembangunan wilayah yang berkelanjutan, pengelolaan sampah diposisikan tidak hanya sebagai kebijakan lingkungan, tetapi sebagai instrumen strategis pembangunan wilayah yang menghubungkan agenda lingkungan dan ekonomi lokal (Putra, 2023). Inisiatif seperti pengembangan TPA BLE, TPS3R berbasis komunitas, digitalisasi melalui SALINMAS, serta kemitraan dengan sektor bisnis dalam pengolahan RDF dan

sampah organik telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan dalam mendorong inovasi dan pembelajaran institusional.

Tabel 4
Peran Kepemimpinan dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Banyumas melalui Pengelolaan Sampah

Komponen yang Dipengaruhi	Dampak Kepemimpinan
Visi-Misi Strategis	Pemimpin Daerah Banyumas (Bupati dan Wakil Bupati) melalui DLH memiliki komitmen yang kuat dalam menetapkan dan menjalankan visi dan misi ke-5 “Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan”. Hal ini terlihat dari implementasi program-program, seperti TPA BLE, pengelolaan TPS3R oleh masyarakat, pengembangan Pusat Daur Ulang, mendorong aktifnya Bank Sampah, yang tidak hanya fokus pada pengelolaan sampah, tetapi mendukung sektor ekonomi lokal seperti pengembangan usaha mikro daur ulang sampah.
Kebijakan Inklusif	Kepemimpinan yang inklusif mendorong partisipasi lintas sektor. Pemerintah daerah bersama dengan berbagai aktor (Tabel 2), memungkinkan pengelolaan sampah menjadi penggerak pembangunan wilayah berbasis pentahelix dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Pemberdayaan Ekonomi Lokal	Pemimpin daerah memanfaatkan peluang untuk meningkatkan perekonomian lokal, misalnya program Bank Sampah memungkinkan masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari daur ulang sampah, fasilitas TPS3R/ TPST/ PDU memungkinkan masyarakat (KSM) menumbuhkan nilai kewirausahaan dan ekonomi. Program-program ini sejalan dengan upaya pengembangan wilayah berbasis ekonomi kerakyatan, yang dampak jangka panjangnya dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.
Integrasi dengan Perencanaan Wilayah	Pengelolaan sampah diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Banyumas, yaitu RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, dan ke dalam Renstra DLH Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.
Penguatan Kelembagaan Lokal	Pemimpin daerah mendorong pemberdayaan kelembagaan lokal, seperti KSM untuk mengelola PDU/

Komponen yang Dipengaruhi	Dampak Kepemimpinan
Penguatan Modal Sosial	TPS3R. Penguatan kelembagaan ini menciptakan kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor bisnis.
Inovasi dan Teknologi	Pemimpin daerah dan kepala desa, bersama-sama mendorong penguatan modal sosial melalui pendekatan kolaboratif, sehingga masyarakat aktif berpartisipasi. Pada akhirnya, kepemimpinan menciptakan kesadaran kolektif pentingnya pengelolaan sampah bagi keberlanjutan wilayahnya.

Sumber: Analisis Penulis, 2025

Temuan dalam Tabel 4 menunjukkan bahwa peran kepemimpinan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas bekerja melalui mekanisme strategis yang saling terhubung. Kepemimpinan daerah berfungsi dalam tiga dimensi utama, yaitu pembingkaian visi pembangunan (*strategic framing*), penciptaan kondisi kelembagaan (*institutional enabling*), dan mobilisasi sosial-ekonomi di tingkat lokal. Integrasi pengelolaan sampah ke dalam dokumen perencanaan formal, seperti RPJMD, RPD, dan Renstra DLH, merefleksikan bahwa sektor persampahan telah diarusutamakan dalam agenda pembangunan wilayah.

Kepemimpinan daerah tidak hanya berperan dalam mendorong pengembangan TPS3R dan bank sampah, tetapi juga membentuk mekanisme kolaborasi yang memperluas ruang partisipasi masyarakat. Melalui pendekatan ini, pengelolaan sampah berfungsi sebagai arena pembelajaran sosial yang memperkuat kapasitas komunitas. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa kepemimpinan di Kabupaten Banyumas mampu mengonversi potensi lokal menjadi modal pembangunan wilayah, tidak

bekerja sebagai pengendali hierarkis, tetapi sebagai orkestrator yang menyelaraskan visi, institusi, dan praktik ekonomi lokal.

Analisis Peran Kelembagaan

Kelembagaan berperan dalam memfasilitasi pasar dan kolaborasi antaraktor dan organisasi secara efisien, membentuk jaringan relasi, serta kerjasama yang mendorong dinamika ekonomi dan pembangunan (Vázquez-Barquero, 2002). Kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas menunjukkan tingkat adaptasi yang relatif matang terhadap tata kelola kolaboratif dengan indikator struktur jaringan kelembagaan, komitmen terhadap tujuan bersama, tingkat kepercayaan antarpihak, mekanisme tata kelola, akses tanggung jawab, mekanisme berbagi informasi, serta akses terhadap sumber daya (Ikram, 2020; Islamiati, 2024). Selain itu, para stakeholder juga memiliki komitmen yang tinggi dalam manajemen pengelolaan sampah, sehingga praktik tata kelola yang baik dapat dicapai termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Rosyidah, 2024). Hal ini telah membentuk sistem yang mampu mengatasi tantangan pengelolaan sampah dengan pendekatan kolaboratif.

Dalam konteks kelembagaan lokal, telah terbentuk KSM sebagai implikasi dari sistem pengelolaan sampah yang baik oleh Pemerintah Daerah. KSM terbentuk tidak hanya melalui inisiatif masyarakat, tetapi juga dari kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Aulia et al., 2022; Islamiati, 2024). Kepercayaan ini menjadi elemen kunci yang mendorong keberlanjutan dan efektivitas dari kelembagaan lokal dalam pengelolaan sampah. Pemerintah daerah menunjukkan kepercayaan kepada KSM dengan memberi ruang untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sampah, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, rasa kepemilikan yang kuat dapat terbentuk di antara anggota KSM sekaligus membuat masyarakat memandang KSM bukan hanya sebagai kelompok kerja, tetapi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari faktor dukungan kebijakan, kepercayaan pemerintah, dan akses terhadap sumber daya yang baik. Kebijakan daerah yang mendorong libatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi kelembagaan lokal, sementara kepercayaan dari pemerintah kepada KSM menciptakan suasana kolaboratif dan menempatkan KSM sebagai mitra strategis. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa KSM memiliki akses terhadap pendanaan, pelatihan, dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan yang efektif (Haryanti et al., 2023; Hidayatullah et al., 2024; Rosyidah, 2024). Pada akhirnya pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pendorong dalam pembangunan wilayah terutama dalam penguatan identitas wilayah Kabupaten Banyumas sebagai wilayah yang memiliki karakter hubungan masyarakat yang kuat, khususnya dalam pengelolaan sampah dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Keberadaan KSM ini juga mencerminkan peran kelembagaan lokal sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) dalam pembangunan endogen. KSM tidak hanya menjalankan fungsi operasional, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran sosial, distribusi manfaat ekonomi, dan penguatan kapasitas lokal. Dalam konteks ini, kelembagaan berfungsi sebagai mekanisme yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan praktik di tingkat komunitas, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan legitimasi pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas.

Analisis Peran Modal Sosial Dalam Menumbuhkan Kewirausahaan di sektor persampahan Kabupaten Banyumas

Modal sosial memainkan peran penting dalam membangun jaringan kepercayaan, norma-norma bersama, dan timbal balik yang memungkinkan kolaborasi antara berbagai pihak (Haryanti et al., 2023; Paudel & Pant, 2023). Kehadiran *local champion* di tingkat desa menjadi peran penting dalam mendorong dalam membangun kepercayaan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi

aktif (Haryanti et al., 2023), khususnya dalam pemilahan sampah. Peran ini diperkuat oleh KSM yang mengatur dan mendukung inisiatif masyarakat, yang menunjukkan bahwa modal sosial dapat memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan dan memfasilitasi implementasi program. Dari perspektif kewirausahaan, pendekatan terapan menunjukkan bagaimana solusi berkelanjutan dapat diciptakan melalui inovasi dan kolaborasi lintas industri (Carayannis & Campbell, 2010; Morisson, 2019; Supriyadi, 2012; Tandon & Sarin, 2024). Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan pihak swasta, termasuk PT. SBI Cilacap yang mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar sampah (RDF), dan PLN EPI yang memanfaatkan limbah biomassa sebagai bahan bakar PLTU. Selain itu, PT. Greenprosa Adikara Nusa bekerja sama dengan desa-desa untuk mengelola sampah organik (Hidayatullah et al., 2024; Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2023). Praktik ini adalah contoh nyata pemanfaatan peluang lokal secara inovatif. Selain itu, dari akademisi juga terlibat dan memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas dengan memberikan dukungan kepada masyarakat, memberikan bantuan alat dan modal usaha, serta memperkuat ekosistem kewirausahaan di tingkat lokal (Islamiati, 2024; Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2023; Putra, 2023; Rosyidah, 2024). Skema pengelolaan terpadu ini memperlihatkan bentuk modal sosial yang diterjemahkan ke dalam rantai nilai ekonomi yang konkret.

Gambar 2

Proses Pengolahan Sampah Terintegrasi



Sumber: Dinas Lingkungan Kabupaten Banyumas (2024)

Proses pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas dapat dipahami melalui

teori modal sosial dan kewirausahaan R. Stimson et al. (2011), yang menekankan terhadap pentingnya kerjasama dan inovasi dalam pembangunan. Modal sosial berperan penting dalam membangun kepercayaan dan kerja sama berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat lokal. Adapun kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup, PLTU Adipala Cilacap, PT Greenprosa Adikara Nusa, PT SBI Cilacap dan Dinas Pekerjaan Umum mencerminkan jaringan sosial yang kuat. Modal sosial ini memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk bekerja secara kolaboratif menuju tujuan bersama, yaitu pengelolaan sampah yang efisien, bernilai ekonomi, dan ramah lingkungan. Hubungan yang kuat ini juga mengurangi hambatan koordinasi, mempercepat implementasi, dan mendorong upaya bersama.

Dari perspektif kewirausahaan, pendekatan yang diterapkan mengarah pada inovasi dan diversifikasi produk. Penggunaan peralatan seperti *conveyor* manual, mesin pemilah, dan mesin *Hot Extruder* merupakan cara kreatif untuk memaksimalkan nilai limbah. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2, sampah organik yang diolah menjadi bahan bakar padat nantinya akan dibeli oleh PLTU Adipala Cilacap, sedangkan maggot kompos akan dibeli oleh Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Greenprosa Adikara Nusa. Kemudian, untuk hasil pengolahan plastik yang diolah kembali menjadi RDF akan dibeli oleh PT. SBI Cilacap. Hasil pengolahan plastik dapat digunakan pada mesin cetak yang nantinya akan diolah kembali menjadi bahan bangunan seperti plester plastik dan genteng yang akan dibeli oleh Dinas Pekerjaan Umum. Skema tersebut menunjukkan bahwa potensi limbah atau sampah dapat diubah menjadi peluang ekonomi yang nyata. Keberhasilan dari pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas ini terbukti dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang terlibat dalam proses pengelolaan (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2023).

Dengan dukungan modal sosial, sampah bukan lagi menjadi sebuah masalah,

melainkan menjadi sebuah peluang untuk menciptakan manfaat ekonomi, mendukung program lingkungan, dan membangun kebiasaan baik dalam masyarakat. Modal sosial yang terbangun di tingkat komunitas, baik dalam bentuk kepercayaan, norma kolektif, maupun jaringan antaraktor berperan sebagai prasyarat munculnya kewirausahaan berbasis pengelolaan sampah. Dalam kerangka pembangunan endogen, modal sosial ini tidak hanya memperkuat partisipasi, tetapi juga mendorong inovasi lokal yang menghasilkan nilai tambah ekonomi dan memperkuat resiliensi wilayah.

V. KESIMPULAN

Keberhasilan pengelolaan sampah berbasis *zero-landfill* di Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari interaksi antara kepemimpinan, kelembagaan, dan modal sosial dalam kerangka pembangunan endogen. Kepemimpinan visioner berperan sebagai penggerak utama dalam membingkai pengelolaan sampah sebagai bagian integrasi dari agenda pembangunan wilayah, bukan sekadar sebagai isu teknis lingkungan. Kepemimpinan tersebut tercermin dalam integrasi pengelolaan sampah ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penguatan kerja sama lintas sektor, dan dorongan terhadap inovasi dan digitalisasi sistem pengelolaan sampah. Di sisi lain, kelembagaan yang kuat berfungsi sebagai mekanisme penghubung antara kebijakan dan praktik di tingkat lokal. Keberadaan KSM sebagai lembaga perantara memungkinkan pengelolaan sampah berjalan secara kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan. Kelembagaan ini memperkuat koordinasi antaraktor, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas distribusi manfaat ekonomi pada tingkat komunitas. Modal sosial melengkapi kedua elemen tersebut dengan membangun kepercayaan, norma kolektif, dan jaringan kerja sama yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Modal sosial berperan sebagai prasyarat tumbuhnya kewirausahaan berbasis pengelolaan sampah dan memperkuat resiliensi ekonomi lokal. Meskipun kontribusi sektor persampahan terhadap indikator

makroekonomi daerah masih relatif kecil, temuan penelitian merefleksikan dampak ekonomi dan sosial pada skala komunitas cukup signifikan, terutama penciptaan lagan kerja, peningkatan pendapatan, dan efisiensi biaya publik. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan wilayah apabila didukung oleh kepemimpinan yang visioner, kelembagaan yang inklusif, dan modal sosial yang kuat. Temuan pada penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bahwa strategi pengelolaan sampah di wilayah non-metropolitan perlu dirancang secara terintegrasi dengan pendekatan pembangunan endogen untuk memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus penguatan ekonomi lokal.

VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam pelaksanaan studi dan penyusunan artikel ini.

VII. REFERENSI

- Adni, N. A., & Setyono, J. S. (2017). Transisi Ekonomi Wilayah Kabupaten di Jawa Tengah dan Keterkaitannya dengan Perkembangan Ekonomi Lokalnya. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 5(4), 292–306.
- Aminah, N. Z. N., & Muliawati, A. (2021). *Pengelolaan Sampah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan (Waste Management in the Context of Waste Management)*. Hmgp.Geo. <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management/>
- Andrianto, F., & Sadat, A. M. (2025). Model Kolaboratif Pengelolaan Limbah untuk Implementasi SDG 11, 12, dan SDG 13 di Lingkungan Pendidikan Tinggi. *Musytari: Neraca Manahemen, Ekonomi*, 21(5).
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative

- Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Anugrah, A. (2023). Banyumas Menjadi Tuan Rumah Smart Green ASEAN Cities UNCDF Atas Prestasinya Ubah Sampah Jadi Uang. *Jateng Info*. <https://jatenginfo.inews.id/read/345172/banyumas-menjadi-tuan-rumah-smart-green-asean-cities-uncdf-atas-prestasinya-ubah-sampah-jadi-uang?>
- Aulia, N. D., Widiyanto, A. F., Kuswanto, Suratman, & Yuniarno, S. (2022). EVALUASI PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT “ SAE ” KELURAHAN PURWOKERTO WETAN EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT AT THE INTEGRATED WASTE MANAGEMENT SITE “ SAE ” AT EAST PURWOKERTO VILLAGE Mahasiswa Program Magi. *Jurnal Kesmas Indonesia*, 14(2), 148–164.
- Badu, S. Q., & Djafri, N. (2017). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Ideas Publishing.
- Bahfein, S., & Alexander, H. B. (2025). TPA BLE Banyumas Bisa Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/properti/read/2025/01/14/073000521/tpa-ble-banyumas-bisa-jadi-percontohan-pengelolaan-sampah?>
- Carayannis, E., & Campbell, D. F. J. (2010). Triple helix, Quadruple helix and Quintuple helix and how do Knowledge, Innovation and the Environment relate To Each other? a Proposed Framework for a Trans-disciplinary analysis of Sustainable development and Social Ecology. *International Journal of Social Ecology and Sustainable Development*, 1(1), 41–69. <https://doi.org/10.4018/jsesd.2010010105>
- Dinas Lingkungan Kabupaten Banyumas.
- (2024). *Audit Teknologi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas*.
- Effendi, H. E. (2024). Awal Tahun, Banyumas Raih Penghargaan Indonesia Green Award 2024. *Metro Jateng*. <https://metrojateng.com/2024/02/26/awal-tahun-banyumas-raih-penghargaan-indonesia-green-award-2024/>
- Haryanti, S., Ganefati, S. P., & Muryani, S. (2023). Jurnal Teknologi Lingkungan The Social Capital and Impact in Waste Management of the Waste Bank System in Yogyakarta Indonesia Modal dan Dampak Sosial dalam Pengelolaan Sampah Sistem Bank Sampah. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 24(2), 190–199.
- Herlina, D. N., Wahyuni, Y. T., Anisa, F. Z., Febrianingsih, I., Purnomo, S. D., & Retnowati, D. (2022). Uji Kelayakan Bisnis dan Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Kutasari, Kabupaten Banyumas. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 497–508.
- Hidayatullah, J., Wardhana, S. J., Okta, E. V., & Fahmi, A. N. (2024). *Laporan Kunjungan Lapangan*.
- Ikram, M. (2020). Pendekatan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah pada Bandk Sampah Kecamatan Manggala. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 94–110.
- Ilhami, N. (2021). *Evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten banyumas provinsi jawa tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Islamiati, D. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANYUMAS. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 748–760.
- Li, X., Song, W., Cao, S., Mo, Y., Du, M., & He, Z. (2024). The impact of multidimensional urbanization on sustainable development goals (SDGs): A long-term analysis of the 31 provinces in China. *Ecological Indicators*, 169, 112822. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.112822>

- Lingga, L. J., Yuana, M., Sari, N. A., Syahida, H. N., & Shahron, C. S. (2024). Sampah di Indonesia : Tantangan dan Solusi Menuju Perubahan Positif. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume, 4(4)*, 12235–12247.
- Marlina, H., Rahmadani, I., & Rahmawati, D. E. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 ke tahun . Menurut Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas (2011), menunjukan bahwa. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 72–80.
- Mayori, K. S. (2024). *Analisis Peluang dan Tantangan Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas*. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
- Medeu, A., Askarova, M., Zhakupova, A., Bauyrzhan, U., & Klug, H. (2025). Sustainable Regional Development : A Challenge Between Socio-Economic Development and Sustainable Environmental Management. *Sustainability*, 17(13), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su17136020>
- Morisson, A. (2019). Innovation centres as anchor spaces of the ‘knowledge city.’ *Global Business and Economics Review*, 21(3–4), 330–345. <https://doi.org/https://doi.org/10.1504/GBER.2019.099396>
- Ningrum, D. M., Djatmiko, A., & Purwendah, E. K. (2020). Cakrawala hukum. *Cakrawala Hukum*, 22(1), 52–64.
- Paudel, U., & Pant, K. P. (2023). Understanding vitality of public space: A review with an example of capital city Kathmandu in Nepal. *Land Use Policy*, 133(September 2019), 106860. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106860>
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2023). *Jalan Terjal Pengelolaan Sampah Di Banyumas Sampai Dengan Zero Land Fill*.
- Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2017). *Local and Regional Development*. Routledge.
- Pramono, S. A., & Sanggoro, H. B. (2024). Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Domestik di Desa Kalikesur Kec. Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 465–471.
- Putra, N. M. S. (2023). *Model Collaborative Governance dalam Mengatasi Permasalahan Sampah di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Raelin, J. (2016). *Leadership-as-Practice: Theory and Application*. Routledge.
- Redaksi Merdeka. (2023). *Cerita di Balik Kabupaten Banyumas Dinobatkan Daerah Pengelola Sampah Terbaik se-Asia Tenggara*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-di-balik-kabupaten-banyumas-dinobatkan-daerah-pengelola-sampah-terbaik-se-asia-tenggara-31628-mvk.html>
- Ridlo, M. (2018). Murka Warga Terkena Limpahan Limbah TPA Kaliori. *Liputan6*. [https://www.liputan6.com/regional/read/3422043/murka-warga-terkena-limpahan-limbah\(tpa-kaliori?](https://www.liputan6.com/regional/read/3422043/murka-warga-terkena-limpahan-limbah(tpa-kaliori?)
- Rosyidah, H. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas : Studi Kasus Era Achmad Husein Manabia : Journal of Constitutional Law. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 04(02), 257–278.
- Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. (2006). *Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy*. Springer International Publishing.
- Stimson, R., Stough, R. R., & Nijkamp, P. (2011). *Endogenous Regional Development*. Edward Elgar Publishing Limited.
- Stimson, R., Stough, R. R., & Salazar, M. (2009). *Leadership and Institutions in*

- Regional Endogenous Development.*
Edward Elgar Publishing Limited.
- Sumarna, A., Haryono, M. B., Fauzi, S., Hanapia, C., & Astri, D. (2023). Environmentally Sustainable Regional Development Management. *Journal Economic Resources*, 5(2), 456–464.
- Supriyadi, R. E. (2012). Local Economic Development And Triple Helix: Lesson Learned From Role of Universities In Higher Education Town of Jatinangor, West Java, Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 52, 299–306. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.467>
- Syahli, R., & Sekarningrum, B. (2017). Pengelolaan Sampah Berbasis Modal Sosial Masyarakat. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(2), 143–151.
- Tandon, N., & Sarin, V. (2024). Importance of Triple Helix in Building Knowledge Economy: A Systematic Literature Review. *Tujin Jishu/Journal of Propulsion Technology*, 45(04), 3491–3503. <https://doi.org/10.52783/tjjpt.v45.i04.9229>
- UNEP. (2015). *Resource Efficiency and Sustainable Consumption and Production: Accelerating the Transition to Sustainable Societies*.
- Vázquez-Barquero, A. (2002). *Endogenous Development: Networking, Innovation, Institutions and Cities*. Routledge.
- Wahyudi, A. (2024). Selesaikan Problem Sampah, Banyumas Raih Indonesia Green Awards 2024. *Suara Merdeka*. <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0911577612/selesaikan-problem-sampah-banyumas-raih-indonesia-green-awards-2024?>
- Yojana, R. M., Manikam, R. M., Kurniawan, W., Nugroho, H. P., & Farihah, I. (2025). Pengelolaan Sampah untuk Mendukung Sustainable Development Goals (SDG's) dan Sircular Economy di Desa Kademangan. *Abdimas Universal*, 7(2), 442–448.